

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP STATUS KEUANGAN DAN
MEKANISME PENGELOLAAN PUNGUTAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA**

Oleh:

Demson Tiopan ¹, Dwi Haryati²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji status keuangan OJK dalam sistem keuangan Negara Republik Indonesia, serta untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan proporsionalitas.

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer digunakan untuk mendukung penelitian data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter dan wawancara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan; *Pertama*, hasil penelitian menunjukkan bahwa status keuangan OJK dilakukan melalui pungutan terhadap industri keuangan merupakan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dibandingkan dengan sistem keuangan yang dilakukan OJK. *Kedua*, mekanisme pengelolaan keuangan OJK dalam pungutan dan pengawasan sudah memenuhi asas akuntabilitas dan proporsionalitas. Akan tetapi mengenai pelaporan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas karena masih belum terserapnya anggaran OJK secara maksimal yang menunjukkan masih banyak kewajiban OJK yang seharusnya dilakukan belum terlaksana.

Kata Kunci: OJK, Status Keuangan, Asas Akuntabilitas, Asas Proporsionalitas.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

**JURIDICAL REVIEW TOWARDS FINANCIAL STATUS AND LEVIES
MANAGEMENT MECHANISM OF THE FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY (FSA) WITHIN THE REPUBLIC OF INDONESIA'S
FINANCIAL SYSTEM**

By:
Demson Tiopan³, Dwi Haryati⁴

This study aims to find out, investigate and assess the financial status of FSA within The Republic of Indonesia's financial system. This study also aims to identify and assess levies management mechanism conducted by the FSA associated with the principle of accountability and proportionality.

Type of research being used is normative legal research supported by empirical research to answer the first and the second research questions. Meanwhile, type of data used in this study are primary and secondary data with technique of documentary studies and interviews.

Based on the results of research, it can be concluded; **Firstly**, the results showed that the financial status of the FSA is conducted through charge collection against the financial industry which is country's source of finances. This argument also strengthened by the definition of state finances stated in the State Finance Act compared to the financial system owned by the FSA. **Secondly**, indeed it is acknowledged that FSA's financial management mechanism already meets the principle of accountability. However, it's reporting mechanism has not fully complied with the principle of proportionality because they do not absorb the FSA budget to the maximum that the FSA indicates more obligations that should be done has not been done.

Keywords: FSA, Financial Status, Accountability Principles, Proportionality Principle.

³ Students Master the State Law, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Lecturer in Administrative Law, Faculty of Law, University of Gadjah Mada, Yogyakarta.